

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Ekonomi Regional**

Individu dalam usahanya untuk bertahan hidup sering kali mengambil keputusan-keputusan terkait pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Sebagai contoh dalam rumah tangga, pendapatan yang dimiliki harus bisa dialokasikan dengan baik sehingga memenuhi setiap kebutuhan rumah tangga tersebut; pokok, primer, dan tersier. Terdapat ilmu yang mempelajari pendistribusian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan, yaitu ilmu ekonomi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan, termasuk uang, perdagangan, dan perindustrian. Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Berasal dari bahasa Yunani, kata ekonomi berasal dari kata *oikonomia*. *Oikonomia* merupakan penggabungan dua kata, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur.

Ilmu ekonomi memiliki beberapa cabang ilmu, seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi publik, ekonomi industri, dan sebagainya. Salah satu

cabang ilmu ekonomi adalah ekonomi regional. Ekonomi regional atau ekonomi wilayah adalah ilmu ekonomi yang membahas struktur, kinerja, dan saling ketergantungan di antara wilayah tertentu (sub-area) dalam sebuah perekonomian negara (yang lebih luas) (Warsito, 2020). Ekonomi wilayah memiliki peran yang penting dalam analisis ekonomi dikarenakan oleh beberapa faktor:

1) Keberagaman aktivitas ekonomi di daerah

Aktivitas ekonomi suatu negara tidak terpusat pada satu wilayah melainkan terdistribusi di seluruh wilayah negara tersebut. Tiap wilayah atau daerah memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing terkait sumber daya alam, tenaga kerja, pola konsumsi, dan sebagainya sebagai penunjang aktivitas ekonomi. Keunikan tiap daerah akan menghasilkan produktivitas dan permasalahan ekonomi yang berbeda-beda.

2) Adanya perpindahan barang dan arus ruang antarwilayah

Perpindahan barang dan arus ruang antarwilayah didukung oleh faktor sarana transportasi yang semakin pesat.

3) Adanya perpindahan konsumen dan pekerja antarwilayah

Perkembangan sarana transportasi tidak hanya memperlancar distribusi barang dan jasa, namun juga mobilitas masyarakat. Oleh sebab itu, konsumen dan pekerja tidak harus berada di wilayah mereka berbelanja dan bekerja.

4) Ada kecenderungan tumbuhnya perkotaan atau *urban area*

Daldjoeni (1998) mendefinisikan urbanisasi sebagai proses ketika permukiman kota cenderung tumbuh baik dalam luasnya, maupun jumlahnya. Proses urbanisasi ini sudah sepatutnya menyebabkan adanya penambahan proporsi

penduduk di kota. Pada tahun 2018, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa 55,3% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan dan akan terus meningkat.

Berbeda dengan cabang ilmu ekonomi yang lainnya, ekonomi regional memasukkan unsur lokasi dalam pokok permasalahannya. Pokok permasalahan yang ada dalam ekonomi regional adalah *what, how, who, when, dan where*. Lokasi yang dimaksud pada ekonomi regional pada dasarnya berada dalam lingkup wilayah baik bagian dari wilayah tersebut maupun menyeluruh. Wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Ferguson (1965) menyebutkan beberapa tujuan ilmu ekonomi regional:

- 1) Menciptakan *full employment*. Salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat pengangguran yang rendah. Meskipun mustahil untuk menciptakan suatu perekonomian dimana tidak adanya pengangguran, paling tidak tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat dikendalikan.
- 2) Menciptakan *economic growth*. Adanya pertumbuhan di perekonomian suatu wilayah dapat diartikan bahwa kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut tinggi pula. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menekan tingkat pengangguran.

- 3) Menciptakan *price stability*. Stabilitas harga dapat memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan tidak membuat masyarakat merasa khawatir terkait harta yang mereka miliki.

Selain itu, ilmu ekonomi regional juga bisa memberikan padangan bagi para pengambil kebijakan. Sebagai contoh, penentuan sektor ekonomi basis di suatu wilayah. Pemerintah dalam hal ini pengambil kebijakan dapat memanfaatkan sektor ekonomi basis untuk meningkatkan perekonomian di wilayah terkait.

## **2.2. Teori Ekonomi Regional**

Dalam kajian ekonomi regional, terdapat beberapa teori yang digunakan dan perlu diperhatikan. Teori-teori ini memberikan pandangan terkait pertumbuhan dan ketimpangan pembanguann ekonomi antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah menurut Tarigan (2005) adalah pertumbuhan atau kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) pendapatan yang terjadi pada masyarakat secara keseluruhan pada suatu wilayah tertentu. Tambunan (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan produk nasional bruto riil. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

### **2.2.1. Teori Ekonomi Neo Klasik**

Robert M. Solow (1970) dan Trevor M. Swan (1956) merupakan dua ahli ekonomi dari Amerika Serikat dan Australia yang mengembangkan teori ekonomi neo klasik. Berdasarkan teori ini, keseimbangan dalam pasar diyakini dapat dibentuk sendiri oleh mekanisme pasar tanpa ada intervensi yang banyak dari

pemerintah. Pemerintah cukup melakukan intervensi dalam hal kebijakan moneter dan kebijakan fiskal saja.

Menurut Solow dan Swan terdapat tiga faktor yang memengaruhi tingkat pertumbuhan, yaitu akumulasi modal, peningkatan sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Ketiga faktor tersebut membentuk suatu fungsi produksi yang tertuang dalam fungsi produksi Cobb Douglas. Fungsi produksi Cobb Douglas merupakan fungsi yang melibatkan dua macam variabel, yaitu independen dan dependen. Variabel independen yang dimaksud adalah modal, sumber daya manusia, dan teknologi sedangkan output proses produksi sebagai variabel dependen.

Teori ini menyarankan agar kondisi pasar selalu menuju pasar sempurna karena dalam kondisi pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh dengan maksimal. Dalam teori ini, perkembangan teknologi atau inovasi memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.2. Teori Kutub Pertumbuhan**

Francois Perroux merupakan seorang ahli ekonomi asal Perancis yang mengemukakan gagasan mengenai teori kutub pertumbuhan atau *growth pole theory*. Perroux dalam teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan tidak terjadi di semua tempat secara merata, melainkan secara bertahap pada satu pusat atau kutub yang akhirnya menyebar ke tempat-tempat lain. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa tempat yang memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan tempat lainnya. Tempat yang memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi ini dianggap sebagai

pusat pertumbuhan kota sedangkan tempat yang memiliki laju pertumbuhan rendah disebut sebagai *hinterland*.

Menurut Warsito (2020) terdapat 4 (empat) saluran mengapa pusat atau kutub pertumbuhan dapat menyebar secara merata dan memicu pertumbuhan kota secara menyeluruh:

1) *Keynesian multiplying effect on income*

Adanya peningkatan pendapatan dan konsumsi pekerja dimana pendapatan dan konsumsi merupakan salah satu sumber peningkatan output daerah. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pengeluaran dan output yang dihasilkan.

2) *Multiplying effect a la Lantier*

Terdapat hubungan input-output antara perusahaan dominan dan perusahaan lain. Dalam proses produksi, perusahaan dominan memerlukan input dari perusahaan lain dan hasil produksi (output) perusahaan dominan mungkin saja digunakan oleh perusahaan lainnya. Hal ini berarti peningkatan produksi suatu perusahaan dapat meningkatkan produksi di perusahaan lain.

3) *Acceleration effect on firms' investments*

Adanya peningkatan investasi di perusahaan dominan dan perusahaan lain yang bisa memicu pertumbuhan output. Hal ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan lain dan akan memicu adanya atau meningkatnya investasi di perusahaan tersebut (Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2017).

4) *A Polarization effect (Agglomeration)*

Montgomery dalam Kuncoro (2002) mengemukakan pengertian aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di Kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Perusahaan dominan yang berkembang dapat menjadi pemicu adanya kutub aglomerasi karena akan menarik perusahaan-perusahaan lain untuk memilih lokasi di perusahaan dominan. Adanya kutub aglomerasi memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, seperti adanya *labor pool*, skala ekonomi atas barang input, dan *knowledge spillover*.

Penentuan kutub pertumbuhan penting dilakukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dengan mengetahui kutub pertumbuhan di suatu kota, pemerintah dapat mencari tahu dan memperkuat faktor-faktor penunjang untuk mengembangkan daerah lain sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyebar. Penentuan kutub pemerintahan dapat menggunakan analisis skalogram.

### **2.2.3. Teori Basis Ekonomi**

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) sering juga disebut dengan *export-base theory* karena menurut teori ini, penjualan produk ke daerah lain atau ekspor menentukan pertumbuhan suatu daerah atau kota. Teori basis ekonomi berprinsip bahwa pertumbuhan ekonomi kota bergantung dengan kemampuannya untuk melakukan ekspor barang dan jasa sektor basis (Warsito, 2020).

Ekspor barang dan jasa sektor basis akan memberikan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian kota. Ketika sektor basis memiliki penambahan tenaga

kerja, maka akan ada peningkatan pada jumlah penduduk secara keseluruhan pula. Hal itulah yang disebut dengan efek ganda (*multiplier effect*).

Dalam teori ini, sektor perekonomian dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu sektor basis dan sektor nonbasis. Sektor basis merupakan sektor yang memiliki tingkat produksi atau produktivitas dan daya saing yang tinggi (Warsito, 2020). Sektor basis ini merupakan sektor yang menjadi sumber ekspor sehingga disebut sebagai penggerak utama dalam perekonomian kota. Sektor basis memiliki sifat *exogenous* karena tidak terikat dengan kondisi perekonomian internal suatu wilayah. Sektor yang memiliki fungsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di wilayah tersebut disebut sektor nonbasis. Sektor ini bersifat *endogenous*, yaitu sektor yang bergantung pada kondisi perekonomian internal suatu wilayah.

### **2.3. Produk Domestik Regional Bruto**

Output atau hasil produksi suatu daerah direpresentasikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDB merupakan akumulasi nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah pada satu tahun. PDB merepresentasikan akumulasi nilai tambah secara nasional sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merepresentasikan akumulasi nilai tambah pada wilayah kabupaten/kota.

Terdapat dua jenis PDRB, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perhitungan nilai tambah barang dan jasa dalam PDRB ADHB menggunakan harga terkini yang berlaku setiap tahun sedangkan dalam PDRB ADHK menggunakan harga pada suatu tahun tertentu yang disebut sebagai tahun dasar. BPS Indonesia menetapkan tahun 2010 sebagai

tahun dasar untuk perhitungan PDRB ADHK. PDRB merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan untuk menggambarkan perekonomian suatu wilayah/kota. Pada umumnya PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari periode ke periode.

Dalam penyusunannya terdapat tiga pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah akumulasi nilai tambah atas barang dan jasa di wilayah dalam satu tahun tertentu berdasarkan unit-unit produksinya (Badan Pusat Statistik, 2017). Unit-unit produksi atau yang biasa disebut dengan sektor dikelompokkan menjadi beberapa kategori lapangan usaha sebagai berikut:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- 2) Pertambangan, dan Penggalian;
- 3) Industri Pengolahan;
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas;
- 5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- 6) Konstruksi;
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- 8) Transportasi dan Pergudangan;
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- 10) Informasi dan Komunikasi;
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi;
- 12) Real Estat;

- 13) Jasa Perusahaan;
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- 15) Jasa Pendidikan;
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- 17) Jasa Lainnya.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. PDRB menurut pendekatan pendapatan dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Faktor produksi yang berperan dalam proses produksi adalah tenaga kerja, kapital, tanah, dan sebagainya. Oleh karena itu, contoh balas jasa yang dimaksudkan adalah upah dan gaji, sewa tanah, serta bunga modal dan keuntungan.

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Dalam perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran, komponen yang diperhitungkan adalah:

- 1) Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga;
- 2) Pengeluaran konsumsi akhir lembaga *non-profit* yang melayani rumah tangga (LNPRT);
- 3) Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah;
- 4) Pembentukan modal tetap domestik bruto;
- 5) Perubahan inventori; dan
- 6) Ekspor neto (ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa).

#### **2.4. Sektor Unggulan (Basis) dan Nonunggulan (Nonbasis) dalam Perekonomian Daerah**

Perekonomian suatu daerah ditentukan oleh kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi daerah pada umumnya dikelompokkan menjadi dua sektor, yaitu kegiatan ekonomi pada sektor basis (unggulan) dan kegiatan ekonomi pada sektor non basis (nonunggulan).

Sektor unggulan (basis) merupakan sektor yang dapat menstimulasi pertumbuhan atau perkembangan sektor-sektor lain, baik sektor yang berperan sebagai penyedia input ataupun sektor yang memanfaatkan output (Widodo, 2006). Sektor unggulan (basis) merupakan sektor yang mampu memenuhi permintaan pasar dalam daerah (lokal) dan pasar luar daerah. Sektor unggulan (basis) erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi karena memiliki peran yang signifikan.

Suatu sektor dapat dikatakan unggulan jika memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan (basis) (Sambodo dalam Usha, 2006):

- 1) Mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
- 2) Memiliki tingkat penyerapan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tinggi;
- 3) Memiliki keterkaitan atau hubungan dengan sektor unggulan (basis);
- 4) Mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Seluruh sektor yang tidak dikategorikan sebagai sektor unggulan (basis) disebut sebagai sektor nonunggulan (nonbasis). Sektor nonunggulan (nonbasis) hanya mampu melayani permintaan pasar dalam daerah (lokal). Dalam kaitannya

dengan pertumbuhan ekonomi, sektor nonunggulan (nonbasis) tidak lebih berpengaruh dibandingkan sektor unggulan (basis).

Suatu daerah dapat memiliki lebih dari satu sektor unggulan (basis). Pemerintah dapat memanfaatkan sektor unggulan (basis) untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan (basis) adalah analisis *Location Quotient* (LQ), analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis *overlay*.

## **2.5. Analisis *Location Quotient* (LQ)**

Penentuan sektor basis dan nonbasis dapat menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ menurut Tarigan (2005) merupakan suatu analisis bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan (basis) dan sektor nonunggulan (nonbasis) pada suatu wilayah dengan cara membandingkan variabel suatu sektor tersebut terhadap skala yang lebih luas seperti provinsi dan nasional. Variabel yang biasanya digunakan akan jumlah tenaga kerja dan nilai tambah.

Terdapat 4 (empat) asumsi dalam analisis LQ, yaitu:

- 1) Pola konsumsi antarwilayah sama;
- 2) Produktivitas pekerja antarwilayah sama;
- 3) Output industri di setiap wilayah sama; dan
- 4) Wilayah acuan tidak melakukan perdagangan dengan wilayah lain.

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai LQ:

$$LQ_i = \frac{E_{ir}}{E_r} \bigg/ \frac{E_{in}}{E_n} = \frac{Y_{ir}}{Y_r} \bigg/ \frac{Y_{in}}{Y_n}$$

Keterangan:

LQ = *Location Quotient*

E<sub>ir</sub> = Jumlah tenaga kerja pada sektor x di kabupaten/kota

E<sub>r</sub> = Jumlah tenaga kerja keseluruhan di kabupaten/kota

E<sub>in</sub> = Jumlah tenaga kerja pada sektor x di provinsi

E<sub>n</sub> = Jumlah tenaga kerja keseluruhan di provinsi

Y<sub>ir</sub> = Jumlah PDRB pada sektor x di kabupaten/kota

Y<sub>r</sub> = Jumlah PDRB keseluruhan di kabupaten/kota

Y<sub>in</sub> = Jumlah PDRB pada sektor x di provinsi

Y<sub>n</sub> = Jumlah PDRB keseluruhan di provinsi

Terdapat 2 (dua) nilai LQ yang mungkin akan dihasilkan dari rumus di atas. Pertama, jika nilai  $LQ > 1$  berarti sektor tersebut memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan rata-rata dan memiliki peran yang signifikan dibandingkan sektor-sektor lain. Kedua, jika nilai  $LQ \leq 1$  berarti sektor tersebut belum memenuhi kriteria sebagai sektor unggulan (basis). Sektor nonunggulan (nonbasis) memiliki peranan yang lebih kecil dibandingkan sektor unggulan (basis) dalam perekonomian.

Analisis LQ bisa membantu untuk melihat perkembangan tiap-tiap sektor karena analisis ini merupakan analisis dalam bentuk *time series*. Dengan mengetahui sektor unggulan (basis) dan sektor nonunggulan (nonbasis) serta mengetahui perkembangan tiap sektor dari tahun ke tahun, dapat membantu pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat.

## 2.6. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Menurut Yusuf (1999), analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisis hasil modifikasi analisis *shift share* yang bertujuan untuk menentukan

deskripsi kegiatan ekonomi suatu wilayah dan kota. Analisis ini berfungsi untuk menentukan sektor-sektor mana saja yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Buhana dan Masyuri (2006, dikutip dalam Erawati, 2012) menyebutkan bahwa analisis MRP dibagi menjadi dua, yaitu analisis Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan analisis Rasio Pertumbuhan Wilayah Preferensi (RPr).

$$RPs = \frac{(\bar{X}_{ij} - X_{ij}) / X_{ij}}{(\bar{X}_{in} - X_{in}) / X_{in}}$$

Keterangan:

RPs = Rasio pertumbuhan sektor i di wilayah studi

$X_{ij}$  = Nilai PDRB (tahun awal) sektor i di wilayah studi

$X_{in}$  = Nilai PDRB (tahun awal) sektor i di wilayah acuan

$\bar{x}_{ij}$  = Nilai PDRB (tahun akhir) sektor i di wilayah studi

$\bar{x}_{in}$  = Nilai PDRB (tahun akhir) sektor i di wilayah acuan

Nilai RPs didapatkan dengan membandingkan laju pertumbuhan pendapatan sektor i wilayah tertentu dengan laju pertumbuhan pendapatan sektor i pada wilayah acuan. Nilai RPs > 1 berarti laju pertumbuhan sektor pada wilayah tertentu lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan sektor di wilayah acuan. Sedangkan jika nilai RPs < 1 berarti laju pertumbuhan sektor di wilayah tertentu lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan sektor di wilayah acuan. Terhadap RPs yang bernilai lebih tinggi daripada satu akan diberikan konotasi positif dan RPs yang bernilai lebih rendah daripada satu akan diberikan konotasi negatif.

Nilai RPr didapatkan dengan cara melakukan perbandingan antara laju pertumbuhan sektor i di wilayah acuan dan laju pertumbuhan seluruh sektor di wilayah acuan. Jika nilai RPr  $> 1$  berarti laju pertumbuhan sektor i di wilayah acuan lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan total di wilayah acuan. Sedangkan jika nilai RPr  $< 1$  berarti laju pertumbuhan sektor i pada wilayah acuan lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan total di wilayah acuan.

Berdasarkan hasil atau nilai RPr dan RPs, sektor diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori yang dijelaskan pada tabel berikut (Yusuf, 1999, dikutip dalam Muta'ali, 2015).

Tabel II. 1 Klasifikasi Daerah Berdasarkan Analisis MRP

<b>Kategori</b>	<b>Nilai RPs</b>	<b>Nilai RPr</b>
Kategori 1	+	+
Kategori 2	+	-
Kategori 3	-	+
Kategori 4	-	-

Sumber: Dikutip dari Yusuf (1999)

Sektor yang masuk ke dalam kategori pertama berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Sektor yang masuk ke dalam kategori kedua berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol pada tingkat kabupaten/kota namun tidak menonjol pada tingkat nasional. Sektor yang masuk ke dalam kategori ketiga berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol di tingkat kabupaten/kota namun memiliki pertumbuhan menonjol di tingkat provinsi. Sektor yang masuk ke dalam kategori keempat berarti pertumbuhannya tidak menonjol baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

## 2.7. Analisis Overlay

Analisis *overlay* merupakan analisis lanjutan dari beberapa analisis sebelumnya. Utama (2010, dikutip dalam Dewi & Yasa, 2018) mendefinisikan analisis *overlay* sebagai suatu analisis yang bertujuan menentukan sektor potensial untuk dikembangkan. Bentuk analisis ini adalah melakukan penggabungan antara analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis *overlay*, perlu dilakukan terlebih dahulu analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu sektor dan subsektor terhadap PDRB dan/atau PDB suatu daerah. Analisis *overlay* dapat menentukan apakah suatu sektor dikategorikan surplus dan tumbuh dominan. Suatu sektor dikatakan surplus ketika memiliki nilai LQ berkonotasi positif dan dikatakan tumbuh dominan apabila memiliki nilai Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) berkonotasi positif. Terhadap sektor yang memiliki nilai LQ dan nilai RPs berkonotasi positif, maka hasil analisis *overlay* juga bernilai positif. Hasil analisis *overlay* yang bernilai negatif terjadi ketika nilai LQ dan nilai RPs yang berkonotasi negatif.

Kesimpulan dari analisis *overlay* menentukan apakah sektor tersebut unggulan atau nonunggulan. Untuk sektor yang mendapatkan hasil analisis *overlay* positif maka merupakan sektor unggulan (basis) sedangkan yang mendapatkan hasil analisis *overlay* negatif dikategorikan sebagai sektor nonunggulan (nonbasis).

## 2.8. Analisis Skalogram

Analisis skalogram menurut Blakely & Leigh (1998) merupakan suatu alat analisis untuk menentukan pusat pertumbuhan di suatu daerah menggunakan indikator fasilitas perkotaan yang dimiliki. Tujuan utama dari analisis skalogram adalah untuk menentukan kecamatan dalam suatu kabupaten/kota yang merupakan pusat pertumbuhan.

Indikator yang digunakan dalam metode ini adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki dan berfungsi pada suatu kecamatan. Fasilitas yang dimiliki pada suatu wilayah menunjukkan fungsi *differentiation* dan *centrality* dari wilayah tertentu. Penggunaan indikator ini karena ketika suatu kecamatan memiliki jenis fasilitas yang beragam, maka semakin tinggi kecenderungan pemusatan di kecamatan tersebut. Semakin banyak jumlah fasilitas yang dimiliki maka wilayah tersebut dianggap memiliki kemampuan paling tinggi dan sebaliknya.

Perhitungan menggunakan analisis skalogram membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi jenis dan jumlah fasilitas yang di setiap kecamatan. Fasilitas yang diperhitungkan pada perhitungan kali ini adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas ekonomi, dan fasilitas pendukung. Tahapan yang kedua adalah pemberian angka satu kepada kecamatan yang memiliki fasilitas tertentu dan pemberian angka nol jika fasilitas tertentu tidak dimiliki di suatu kecamatan. Tahapan yang ketiga adalah melakukan pembobotan dan menentukan indeks sentralitas. Tahapan yang terakhir adalah menentukan hierarki tiap kecamatan berdasarkan indeks sentralitas.

Terdapat kelemahan dalam analisis skalogram ini, yaitu belum dipertimbangkannya bobot dan pengaruh banyaknya jumlah fasilitas karena hanya memberikan nilai atau poin satu ketika suatu kecamatan memiliki fasilitas tertentu dan nilai 0 (nol) ketika suatu kecamatan tidak memiliki fasilitas tertentu (Zakiyah, 2019).

## **2.9. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Intan Saputri dan Arfida Boedi dengan judul “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan” dilakukan pada tahun 2018 bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan sektor unggulan pada penelitian ini menggunakan empat teknik analisis, yaitu analisis *Tipologi Klasse*, analisis *Location Quotient* (LQ), analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan analisis *Geographic Information System* (GIS). Hasil analisis membagi sektor ekonomi menjadi empat kategori, yaitu sektor unggulan, sektor prospektif, sektor andalan, dan sektor tertinggal. Berdasarkan hasil analisis, terhadap lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, hanya satu kabupaten/kota yang tidak memiliki sektor unggulan. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki tujuh sektor unggulan, Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki satu sektor unggulan, Kabupaten Muara Enim memiliki dua sektor unggulan, Kabupaten Lahat memiliki tiga sektor unggulan, Kabupaten Musi Rawas memiliki dua sektor unggulan, Kabupaten Banyuasin memiliki dua sektor unggulan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki tiga sektor unggulan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki tiga

sektor unggulan, Kabupaten Ogan Ilir memiliki empat sektor unggulan. Kabupaten Empat Lawang memiliki empat sektor unggulan, Kota Palembang memiliki satu sektor unggulan, Kota Prabumulih memiliki satu sektor unggulan, Kota Pagaram memiliki dua sektor unggulan, dan Kota Lubuk Linggau memiliki empat sektor unggulan.

Penelitian oleh Zalika Oktavia, Dwidjono Hadi Darwanto, dan Slamet Hartono dengan judul penelitian “Sektor Pertanian Unggulan di Sumatera Selatan” bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi yang diberikan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan dan mengidentifikasi sektor dan subsektor pertanian unggulan di Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah PDRB Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2013. Metode atau teknik analisis yang digunakan adalah analisis LQ, analisis DLQ, dan analisis *shift share*. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 21,79% dimana subsektor yang memiliki kontribusi tertinggi adalah perkebunan (10,19%) dan subsektor yang memiliki kontribusi terendah adalah kehutanan (1,70%).